

SKRIPSI

**OPTIMALISASI DIPLOMASI PARLEMEN INDONESIA DALAM
PENANGANAN KRISIS KEMANUSIAAN DI GAZA**



Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Departemen

Ilmu Hubungan Internasional

Oleh:

NURJIHAN SHAHID

E061201022

DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2024

HALAMAN JUDUL

**OPTIMALISASI DIPLOMASI PARLEMEN INDONESIA DALAM
PENANGANAN KRISIS KEMANUSIAAN DI GAZA**

Disusun dan diajukan oleh:

Nurjihan Shahid

E061201022

SKRIPSI

*Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*

DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2024

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : OPTIMALISASI DIPLOMASI PARLEMEN INDONESIA
DALAM PENANGANAN KRISIS KEMANUSIAAN DI GAZA

N A M A : NURJIHAN SHAHID

N I M : E061201022

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, 5 Agustus 2024

Pembimbing I,


Aswin Baharuddin, S.IP, MA
NIP. 198607032014041002

Pembimbing II,


Abdul Razaq Z Cangara, S.IP, M.Si, MIR
NIP. 198909132024061001

Mengesahkan :

Plt. Ketua Departemen Hubungan Internasional,




Prof. Dr. Phil. Sukri, S.IP, M.Si
NIP. 197508182008011008

HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : OPTIMALISASI DIPLOMASI PARLEMEN INDONESIA
DALAM PENANGANAN KRISIS KEMANUSIAAN DI GAZA

N A M A : NURJIHAN SHAHID

N I M : E061201022

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Jum'at, 26 Juli 2024.



Ketua : Ishaq Rahman, S.IP, M.Si

Sekretaris : Atika Puspita Marzaman, S.IP, MA.

Anggota : 1. Seniwati, S.Sos, M.Hum, Ph.D.

2. Aswin Baharuddin, S.IP, MA

3. Abdul Razaq Z Cangara, S.IP, M.Si, MR

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurjihan Shahid
NIM : E061201022
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul:

“OPTIMALISASI DIPLOMASI PARLEMEN INDONESIA DALAM PENANGANAN KRISIS KEMANUSIAAN DI GAZA”

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilalihan tulisan orang lain, dan bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 13 Agustus 2024

Yang Membuat Pernyataan,



Nurjihan Shahid

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbilalamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Optimalisasi Diplomasi Parlemen Indonesia dalam Penanganan Krisis Kemanusiaan di Gaza” ini dengan baik. Tidak lupa shalawat serta salam yang tidak henti-hentinya penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu menjadi suri tauladan dalam menjalani kehidupan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis menyadari begitu banyak hal yang telah penulis lewati hingga sampai titik saat ini. Penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih dan rasa syukur kepada orang tua penulis, Mama **Rukinem** dan Bapak **Murshahid** yang tak henti-hentinya memberikan doa, dukungan dan cintanya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Kepada adik-adik penulis, **Zahra dan Azzam**, terima kasih telah menjadi saudara yang sangat mendukung penulis hingga akhir, terima kasih atas saran, kritikan dan cintanya kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan, dukungan, bimbingan, saran, serta kritik dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan rasa syukur kepada pihak-pihak yang telah hadir selama proses penulisan hingga selesainya skripsi ini.

1. Terima kasih kepada Dekan FISIP UNHAS **Bapak Prof. Dr. Phil. Sukri, S.I.P., M.Si** dan Wakil Dekan FISIP UNHAS **Ibu Prof. Dr. Hasniati, S.Sos.,M.Si.** dan **Bapak Dr. Moehammad Iqbal Sultan, M.Si.**, serta

Bapak Prof. Dr. Suparman, M.Si yang telah membantu penulis dalam segala urusan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

2. Terima kasih kepada Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP UNHAS **Bapak Prof. H. Darwis, MA, Ph.D** yang telah memberikan bantuan dan arahan serta ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan dan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Bapak senantiasa diberikan kesehatan dan dilindungi oleh Allah SWT.
3. Terima kasih kepada seluruh dosen Hubungan Internasional FISIP UNHAS yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan, kepada **Bapak Dr. H.Husain Abdullah M.Si, Bapak Dr. Patrice Lumumba, MA, Bapak Muh.Nasir Badu, S.Sos., M.Hum., Ph.D., Bapak Ishaq Rahman S.IP., M.Si., Ph.D.(Cand.), Bapak Drs. H.M. Imran Hanafi M.A., M.Ec, Bapak Burhanuddin S.IP. M.Si, Bapak Dr. Munjin Syafik Asy'ari M.SI, Bapak Dr. H. Adi Suryadi Culla MA, Bapak Agussalim Burhanuddin S.IP., MIRAP Ph.D (Cand.), Ibu Seniwati, S.Sos., M.Hum., Ph.D., Bapak Biondi Sanda Sima, S.IP., M.Si., L.LM, Bapak Muh.Ashry Sallatu S.IP., M.Si, Ibu Nurjannah Abdullah S.IP., M.A, Ibu Pusparida Syahdan S.Sos., Ibu Atika Puspita Marzaman, S.IP., MA M.S, Ibu Mashita Dewi Tidore, S.IP., M.A., Ibu Nur Isdah S.IP., MA. Semoga Bapak dan Ibu sekalian selalu diberi kesehatan dan dilindungi oleh Allah SWT.**
4. Terima kasih banyak kepada **Bapak Aswin Baharuddin, S.IP, MA**, selaku Pembimbing I, dan **Bapak H.Abdul Razaq Z.Cangara S.IP., MIR**, selaku

Pembimbing II yang senantiasa memberikan arahan untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga selalu diberikan kesehatan dan dilindungi oleh Allah SWT.

5. Terima kasih kepada staf dan pegawai Departemen Ilmu Hubungan Internasional **Ibu Rahma** dan **Pak Ridho** yang telah membantu penulis dalam segala urusan administrasi selama perkuliahan hingga selesai.
6. Terima Kasih kepada seluruh staf dan pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuannya kepada penulis dalam pengurusan berkas selama perkuliahan.
7. Terima kasih kepada kakak **Warsito Alamsah** yang telah menemani, membantu, serta senantiasa memberikan doa dan semangat kepada penulis selama perkuliahan hingga proses penulisan skripsi ini berlangsung.
8. Terima kasih kepada sahabat-sahabat penulis, **ukhtifillahxsumbupendek (Coco, Fate, MJ, Aisyah, Firda, Pio, Tiwi, dan Nopi)** yang selalu ada dalam suka dan duka penulis sejak SMA, serta telah menemani penulis dan memberikan doa dan semangat saat proses penulisan skripsi ini berlangsung.
9. Terima kasih kepada sahabat-sahabat penulis dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan ini, **250k reborn (Putri, Muthia, Liza, dan Fira)** yang telah menemani penulis selama proses penulisan skripsi ini walaupun terkadang lebih banyak nongkrong dan jalannya, tapi kehadiran sahabat-sahabat sekalian memberikan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini hingga akhir.

10. Terima kasih kepada teman-teman KKN penulis, **Sobat Ular (Heri, Isra, Giscka, Erika, Astrid, Wawan, Zahra, Poi, Aqilah)** yang telah kebersamai dan memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Terima kasih kepada teman-teman magang Komisi I DPR RI, **Regina, Icad, Devita, Nadine, Nara, Syarah, Sa'ya, Caca, dan Tri** yang telah menemani masa magang penulis dengan penuh kebersamaan.
12. Terima kasih kepada **Amsterdam Institute** yang menjadi wadah untuk mengasah kemampuan dan mengembangkan diri bagi penulis.
13. Terima Kasih kepada teman-teman **ALTERA 2020** yang telah memberikan bantuan-bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta hal-hal lain selama perkuliahan.
14. Terima kasih pada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-satu, keluarga besar, teman-teman penulis dan orang-orang yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis.

ABSTRAK

Nurjihan Shahid, E061201022, "**OPTIMALISASI DIPLOMASI PARLEMEN INDONESIA DALAM PENANGANAN KRISIS KEMANUSIAAN DI GAZA**", di bawah bimbingan Aswin Baharuddin, S.IP, MA selaku Pembimbing I dan Abdul Razaq Z. Cangara, S.IP, M.Si, M.IR selaku Pembimbing II, Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya optimalisasi serta tantangan diplomasi parlemen Indonesia dalam penanganan krisis kemanusiaan di Gaza. Penelitian ini menggunakan konsep diplomasi parlemen dan krisis kemanusiaan. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dengan menggunakan data primer berupa laporan delegasi DPR RI dan BKSAP, serta data sekunder sebagai jenis datanya, yang diperoleh dari buku, jurnal, artikel, website resmi, dokumen pemerintah, media massa, dan arsip yang berhubungan dengan fokus penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa upaya diplomasi parlemen Indonesia dalam penanganan krisis kemanusiaan di Gaza dioptimalkan dengan melihat sejumlah upaya yang dilakukan dalam berbagai level, baik regional maupun internasional. Pada level regional, diplomasi parlemen dioptimalkan melalui kerjasama bilateral serta advokasi pada forum regional seperti APA, ASEAN, dan lainnya. Pada level global, diplomasi parlemen Indonesia mengadvokasi isu Palestina di forum internasional, berpartisipasi dalam resolusi PBB, dan mediasi. Meski menghadapi tantangan geopolitik dan keterbatasan sumber daya, posisi netral Indonesia dan dukungan negara Muslim memberi peluang untuk memperkuat diplomasi dan perjuangan untuk perdamaian di Gaza.

Kata Kunci: Diplomasi Parlemen, Krisis Kemanusiaan, Gaza, Indonesia

ABSTRACT

Nurjihan Shahid, E061201022, "OPTIMIZATION OF INDONESIAN PARLIAMENTARY DIPLOMACY IN HANDLING THE HUMANITARIAN CRISIS IN GAZA," under the guidance of Aswin Baharuddin, S.IP, MA as Supervisor I, and Abdul Razaq Z. Cangara, S.IP, M.Si, M.IR as Supervisor II, Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University.

This research aims to investigate the optimization efforts and challenges of Indonesian parliamentary diplomacy in addressing the humanitarian crisis in Gaza. The study employs the concepts of parliamentary diplomacy and humanitarian crisis. The methodology used is qualitative research, utilizing primary data in the form of reports from the Indonesian House of Representatives (DPR RI) delegation and BKSAP, as well as secondary data obtained from books, journals, articles, official websites, government documents, mass media, and archives related to the research focus. The findings of this study indicate that the efforts of Indonesian parliamentary diplomacy in handling the humanitarian crisis in Gaza are optimized through various levels, both regional and global. At the regional level, parliamentary diplomacy is optimized through bilateral cooperation and advocacy in regional forums such as APA, ASEAN, and others. At the global level, Indonesian parliamentary diplomacy advocates the Palestinian issue in international forums, participates in UN resolutions, and engages in mediation. Despite facing geopolitical challenges and resource limitations, Indonesia's neutral position and the support of Muslim countries provide opportunities to strengthen diplomacy and the struggle for peace in Gaza.

Keywords: Parliamentary Diplomacy, Humanitarian Crisis, Gaza, Indonesia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan dan Batasan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Kerangka Konseptual	15
1. 4. 1 Diplomasi Parlemen	15
1. 4. 2 Krisis Kemanusiaan	19
1.5 Metode Penelitian	21
1. 5. 1 Tipe Penelitian.....	21
1. 5. 2 Jenis Data	21
1. 5. 3 Teknik Pengumpulan Data	22
1. 5. 4 Teknik Analisis Data	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	24
2.1 Multi-track Diplomacy	24
2.2 Diplomasi Parlemen	27
2.3 Krisis Kemanusiaan.....	36
2.4 Penelitian Terdahulu	44
BAB III GAMBARAN UMUM	49
3.1 Dinamika Hubungan Indonesia-Palestina	49
3.2 Krisis Kemanusiaan di Gaza	56
3.2.1 Dinamika Krisis Kemanusiaan di Gaza	57
3.2.2 Kondisi Ekonomi dan Infrastruktur	67

3.2.3	Kondisi Pendidikan dan Kesehatan.....	69
3.2.4	Respons dan Bantuan Internasional	70
3.2.5	Upaya Perdamaian	72
3.3	Diplomasi Parlemen Indonesia.....	75
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN		80
4.1	Optimalisasi Diplomasi Parlemen Indonesia dalam Penanganan Krisis Kemanusiaan di Gaza.....	80
4.1.1	Peran Diplomasi Parlemen Indonesia di Level Regional.....	80
4.1.2	Peran Diplomasi Parlemen Indonesia di Level Global	86
4.1.3	Kolaborasi Parlemen Indonesia dengan berbagai Aktor dalam Meningkatkan Penanganan Krisis Kemanusiaan di Gaza	95
4.2	Peluang dan Tantangan dalam Optimalisasi Diplomasi Parlemen Indonesia terhadap Penanganan Krisis Kemanusiaan di Gaza	101
4.2.1	Peluang dalam Optimalisasi Diplomasi Parlemen Indonesia terhadap Penanganan Krisis Kemanusiaan di Gaza.....	101
4.2.2	Tantangan dalam Optimalisasi Diplomasi Parlemen Indonesia terhadap Penanganan Krisis Kemanusiaan di Gaza	108
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		117
5.1	Kesimpulan.....	118
5.2	Saran.....	120
DAFTAR PUSTAKA.....		122

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Kerangka Berpikir.....	15
Gambar 3. 1 Palestina Wilayah Mandat Inggris.....	57
Gambar 3. 2 Grafik Korban Jiwa Krisis Kemanusiaan di Gaza	63
Gambar 3. 3 Oslo II Agreement Boundaries Sumber : OCHA	73
Gambar 4. 1 Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon dalam Foto Bersama Usai Mengikuti Agenda APA di Antalya, Turki Sumber: BKSAP DPR RI.....	82
Gambar 4. 2 Grafik Cadangan Minyak Mentah Terbukti di Dunia	112

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Bencana Akibat Ulah Manusia (<i>Manmade Disaster</i>).....	41
Tabel 4. 1 Penyaluran Dana Zakat BAZNAZ untuk Bantuan Kemanusiaan di Palestina Tahun 2019-2021	90

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini, jumlah orang yang terdampak oleh krisis kemanusiaan melampaui angka tertinggi yang pernah tercatat dalam sejarah. Satu dari enam anak tinggal di wilayah yang berdekatan dengan zona konflik. Pada akhir Juni 2023, sebanyak 110 juta orang mengalami pengungsian di seluruh dunia, sementara United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) memproyeksikan bahwa jumlah orang yang terpaksa mengungsi akan mencapai lebih dari 130 juta pada tahun 2024, sebuah angka yang mencapai puncak tertinggi sejak Perang Dunia II (United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), 2023). Dalam beberapa tahun terakhir, krisis kemanusiaan tidak hanya menjadi lebih sering terjadi, melainkan juga menjadi lebih berkepanjangan, kompleks, dan mahal, yang menguji keterbatasan komunitas merespons krisis kemanusiaan dalam mendapatkan pendanaan yang tidak mencukupi.

Krisis kemanusiaan melibatkan berbagai aspek, termasuk: (1) bencana buatan manusia seperti konflik bersenjata, pengungsian paksa, dan krisis pengungsi; (2) bencana alam, seperti banjir, badai, gempa bumi, dan kekeringan; serta (3) wabah penyakit menular yang signifikan. Pada banyak kasus, terdapat kemungkinan terjadinya beberapa jenis krisis secara bersamaan, seperti konflik bersenjata atau bencana alam yang berkaitan dengan kelaparan dan wabah penyakit. Semua bentuk krisis ini

memberikan dampak serius terhadap kesehatan manusia, dengan dampak yang tidak merata pada populasi yang kurang beruntung dan masyarakat di negara-negara dengan pendapatan rendah dan menengah/ *Low and Middle Income Countries* (LMIC), yang cenderung lebih sering terpapar krisis kemanusiaan tetapi umumnya kurang memiliki kesiapan menghadapinya (Kohrt et al., 2019).

Perang atau konflik bersenjata, sebagai salah satu pemicu utama, memiliki peran sentral dalam memicu dan memperparah krisis kemanusiaan. Dampak yang merata oleh konflik bersenjata menciptakan kondisi yang sangat sulit bagi masyarakat sipil, mengancam kesejahteraan mereka, dan menciptakan tantangan kompleks bagi upaya kemanusiaan. Faktor-faktor seperti pengungsian paksa, kerusakan pada infrastruktur krusial, krisis kesehatan, kelaparan, pelanggaran hak asasi manusia, serta dampak psikologis dan sosial, semuanya menunjukkan urgensi yang mendalam dalam menanggapi konsekuensi serius perang terhadap populasi yang terdampak. Sebagai contoh, konflik di Suriah telah menghasilkan krisis kemanusiaan yang rumit, dengan jutaan pengungsi dan korban jiwa. Demikian pula, konflik di Palestina dan Yaman juga telah menciptakan krisis kemanusiaan yang serius, dengan dampak yang meluas terhadap masyarakat (Halomoan, 2019).

Jalur Gaza, yang kini dihuni oleh dua juta warga Palestina, secara terus menerus mengalami kehancuran luas dan penderitaan manusia, yang juga disebut sebagai “*the world’s largest open-air prison*” (penjara terbuka

terbesar di dunia) dan sebuah “laboratorium” bagi Israel untuk menguji dan menyempurnakan teknik kontrol dan manajemen (Asi et al., 2022). Konsep Jalur Gaza sebagai entitas geopolitik adalah hasil dari ekspansi kolonial Israel dan fragmentasi Palestina. Jalur Gaza berfungsi sebagai representasi spasial dari Impian kolonialis pemukim tentang ketiadaan Palestina. Perlakuan Israel terhadap Jalur Gaza, termasuk pengepungan berkelanjutan dan serangan militer, menunjukkan kemauan pemukim untuk menaklukkan setiap tindakan politik atau ideologi yang mengakui keberadaan penduduk asli (Saleh, 2020).

Sejak tahun 2007, Israel memberlakukan blokade darat, udara, dan laut di Jalur Gaza, yang telah dan terus memiliki dampak mengerikan pada kehidupan di Gaza. Perang pertama konflik Israel-Palestina dan konflik Arab-Israel yang lebih luas dimulai pada tahun 1948. Palestina menyebut peristiwa ini sebagai Al- Nakba, kata Arab untuk “Bencana” dan menandakan hari di mana banyak warga Palestina melarikan diri atau diusir dari rumah mereka dan menjadi pengungsi di negara-negara Arab sekitarnya, memulai apa yang sekarang menjadi pengusiran permanen negara mereka (Al Jazeera, 2015) (Ibish, 2021). Nakba adalah contoh invasi kolonial pemukim, di mana sekelompok pemukim mengklaim kedaulatan atas tanah asli, sambil menghilangkan dan mengusur mayoritas penduduk asli (Asi et al., 2022).

Sejak Nakba, Palestina, terutama Jalur Gaza, telah menjadi saksi perulangan konflik bersenjata, serangan udara yang berulang, dan invasi

militer, yang mengakibatkan ribuan kematian, cedera, dan pengungsian, sekaligus merusak fasilitas kesehatan dan infrastruktur yang vital (Mosleh et al., 2018). Dampak Nakba dan konsekuensinya yang berkelanjutan terus membentuk identitas nasional Palestina dan mempengaruhi pengalaman sehari-hari seluruh warga Palestina (Mosleh et al., 2018). Saat ini, sekitar 75% dari populasi Gaza tercatat sebagai pengungsi, dimana sebagian besar dari mereka bergantung pada bantuan kemanusiaan (Farhat et al., 2023).

Kebutuhan kemanusiaan di Gaza mengalami peningkatan yang mencengangkan sejak eskalasi konflik pada 7 Oktober 2023, yang mengakibatkan terhentinya pasokan listrik, makanan, air, dan bahan bakar, serta pembatasan akses dan pergerakan di dalam Gaza. Kelompok militan Palestina yang dipimpin oleh Hamas melancarkan serangan besar-besaran terhadap Israel dari Jalur Gaza. Serangan ini terjadi melalui penyeberangan perbatasan Gaza-Israel, menerobos tembok pembatas, dan masuk ke pemukiman serta instalasi militer Israel. Operasi ini dinamakan Operasi Banjir Al-Aqsa (Operation Al-Aqsa Flood) oleh Hamas. Peristiwa ini mencatatkan konflik langsung pertama di wilayah Israel sejak Perang Arab-Israel tahun 1948. Perang dimulai dengan serangan roket ke Israel dan invasi kendaraan ke wilayah tersebut, melibatkan serangan terhadap warga sipil dan pangkalan militer Israel. Eskalasi konflik ini menciptakan ketegangan yang meningkat dan konfrontasi bersenjata di daerah tersebut (OCHA, 2023a).

Pintu keluar Rafah tetap tertutup hingga 21 Oktober, menghambat perlintasan bantuan kemanusiaan penting, termasuk makanan, air, dan obat-obatan. Pada 17 Desember, titik masuk Kerem Shalom dibuka untuk truk-truk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan *Non-Governmental Organization* (NGO) Internasional yang akan masuk ke Gaza. Respon kemanusiaan bersama terus terbatas di seluruh Gaza karena keterbatasan keamanan dan akses, sejalan dengan kebutuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang disebabkan oleh pengungsi internal massal, penghancuran infrastruktur, runtuhnya struktur kesehatan, ketidakmampuan mengakses air bersih, dan penurunan ekstrem ketidakamanan pangan, yang mengakibatkan 2,2 juta orang memerlukan bantuan kemanusiaan di Gaza (Palestine Logistics Cluster, 2024).

Pada 17 Januari 2024, setidaknya 24.620 warga Palestina dilaporkan tewas di Jalur Gaza sejak dimulainya konflik (hingga 70 persen dilaporkan sebagai perempuan dan anak-anak). Lebih dari 61.830 warga Palestina dilaporkan terluka, termasuk setidaknya 10.787 anak-anak (data sebagian terurai hingga 31 Desember 2023). Ribuan anak dilaporkan masih hilang dan kemungkinan terluka atau tewas di bawah puing-puing bangunan yang hancur. Kementerian Pendidikan melaporkan bahwa per 16 Januari, total 4.327 siswa dan 231 guru dan staf administrasi dilaporkan tewas di Jalur Gaza, dengan tambahan 7.819 siswa dilaporkan terluka. Lebih dari 90 persen sekolah di Jalur Gaza rusak atau digunakan sebagai tempat penampungan IDP (UNICEF in The State of Palestine, 2024).

Masyarakat di Jalur Gaza menghadapi risiko penyebaran penyakit menular yang sangat mendesak. Angka yang tercatat sejak pertengahan Oktober 2023 menunjukkan lebih dari 213.000 kasus infeksi saluran pernapasan atas, 68.000 kasus kudis dan kutu, 44.000 kasus ruam kulit, 7.000 kasus kuning, dan 6.000 kasus cacar air. Selain itu, lebih dari 152.000 kasus diare telah dilaporkan. Lebih dari setengah dari kasus-kasus ini - sebanyak 81.000 - terjadi pada anak-anak di bawah usia lima tahun, yang merupakan peningkatan 23 kali lipat dari data dasar pada tahun 2022 (WHO, 2024).

Krisis kemanusiaan di Jalur Gaza telah menarik perhatian dunia atas dampak yang meresahkan terhadap berbagai aspek kehidupan di kawasan tersebut. Dengan serangkaian konflik dan ketegangan yang berkelanjutan, penduduk Gaza dihadapkan pada tantangan yang substansial dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya. Oleh karena itu, konflik ini memerlukan keterlibatan dan respons cepat dari berbagai aktor baik negara, lembaga internasional, ataupun *non-governmental organization* (NGO) yang terkoordinasi dan efektif.

Empati terhadap krisis kemanusiaan di Gaza menjadi landasan utama bagi bantuan dan upaya dari berbagai pihak dalam penyelesaian permasalahan ini, salah satunya Indonesia. Indonesia telah lama menunjukkan perhatian terhadap isu kemanusiaan di Gaza dan konflik Israel-Palestina secara umum. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk

Muslim, Indonesia memiliki posisi yang aktif dalam mendukung hak-hak rakyat Palestina dan menyerukan solusi damai bagi konflik tersebut.

Indonesia dan Palestina memiliki sejarah hubungan diplomatik yang panjang, dengan dukungan Indonesia terhadap Palestina yang bermula sejak awal kemerdekaannya. Dari sudut pandang politik, dalam perjuangan mencapai kemerdekaan Indonesia, Palestina menjadi salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia dan eksistensinya sebagai entitas negara. Tidak hanya itu, Palestina juga memiliki pengaruh yang kuat dengan negara-negara Arab, yang dengan pengaruhnya di Liga Arab, mengajak negara-negara Arab untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Berangkat dari ini, dapat disimpulkan bahwa ada "kewajiban moral" yang diberikan oleh Palestina kepada Indonesia dalam membantu sebagai sesama negara dunia ketiga (Nurhadi, 2023).

Selain itu, kita juga dapat melihat peran Indonesia dalam membela Palestina dalam konfrontasi politik internasional dengan Israel. Penolakan terhadap eksistensi Israel dapat terlihat pada tahun 1948 ketika Israel menyatakan kemerdekaannya; Soekarno menerima kedatangan Grand Mufti Haji Amin El Husni. Selain itu, Indonesia dan Palestina dalam Gerakan Non-Blok dan Konferensi Asia-Afrika menolak kehadiran Israel dalam forum pada tahun 1955 (Herdi Sahrasad et al., 2020).

Pemerintah dan masyarakat Indonesia telah terlibat secara aktif dalam menangani krisis kemanusiaan di Gaza melalui serangkaian tindakan yang mencerminkan komitmen mereka terhadap upaya penyelesaian konflik dan

bantuan kepada warga yang terdampak. Terdapat beberapa inisiatif yang telah dilakukan baik dari pemerintah Indonesia maupun masyarakat terhadap penanganan krisis kemanusiaan ini.

Pertama, dukung diplomatik melalui PBB. Seiring dengan 152 negara lainnya, Indonesia secara resmi mendukung Resolusi Majelis Umum PBB yang mendesak terjadinya gencatan senjata kemanusiaan di Gaza. Tindakan ini mencerminkan partisipasi aktif Indonesia dalam upaya bersama komunitas internasional untuk mengatasi krisis tersebut (Kementerian Luar Negeri, 2023a).

Kedua, bantuan kemanusiaan yang komprehensif. Pemerintah Indonesia telah menyediakan bantuan kemanusiaan berupa paket obat-obatan, tenda, pakaian, selimut, *sleeping bag*, dan kelambu. Langkah ini mencerminkan respons yang terukur untuk memenuhi kebutuhan mendesak para korban di Gaza (V. N. Setiawan, 2024).

Ketiga, peran relawan Indonesia di Gaza. Fikri Rofiul Haq, seorang relawan Indonesia, telah secara langsung terlibat sebagai saksi mata konflik di Gaza. Kontribusinya dalam memberikan laporan terkini tentang kondisi di lapangan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dampak krisis kemanusiaan di wilayah tersebut (Llewellyn, 2023).

Keempat, solidaritas masyarakat melalui aksi demonstrasi. Masyarakat Indonesia telah mengekspresikan solidaritasnya dengan Gaza melalui aksi demonstrasi yang menyoroti keprihatinan terhadap situasi kemanusiaan di

sana. Aksi ini mencerminkan partisipasi aktif dan kesadaran masyarakat Indonesia terhadap isu global tersebut.

Kelima, boikot produk Israel. Terdapat seruan untuk melakukan boikot terhadap produk dan bisnis yang memiliki keterkaitan dengan Israel, termasuk Starbucks. Langkah ini mencerminkan upaya masyarakat untuk menyuarkan protes secara ekonomi sebagai bentuk dukungan terhadap Palestina.

Pemerintah dan masyarakat Indonesia telah menjalankan berbagai inisiatif yang mencakup aspek diplomatik, bantuan langsung, kontribusi sukarela, serta ekspresi solidaritas dan protes ekonomi sebagai bagian dari respons holistik terhadap krisis kemanusiaan di Gaza. Dukungan Indonesia yang teguh terhadap Palestina menjadi tema yang konsisten dalam kebijakan luar negerinya, terutama diungkapkan melalui forum internasional seperti Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Pemimpin Indonesia secara konsisten telah mendukung kemerdekaan Palestina dan mengambil inisiatif diplomatik untuk memajukan perjuangan Palestina.

Komitmen Indonesia dalam mendukung perjuangan kemerdekaan rakyat Palestina tidak hanya bersumber dari pemerintah (eksekutif) dan masyarakat, tetapi juga melibatkan lembaga parlemen/legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia/DPR RI). Keterlibatan DPR RI ini terwujud dalam praktik diplomasi parlemen di berbagai forum internasional, terutama dalam forum antarparlemen untuk menyatakan solidaritas dan mendesak untuk mengakhiri pendudukan Israel dan krisis

kemanusiaan melalui berbagai saluran diplomatic (Amari, 2023)(Muhamad, 2014).

Pada Sidang ke-118 Inter-Parliamentary Union (IPU) di Cape Town, Afrika Selatan, April 2008, DPR RI bersama delegasi parlemen negara-negara sahabat, terutama yang tergabung dalam Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC), mengajukan usulan agar sidang menambah satu agenda pembahasan tambahan, yaitu isu Palestina. Saat itu, situasi di Jalur Gaza memanas karena serangan Israel, yang menyebabkan kerusakan parah pada lingkungan, bangunan vital, infrastruktur, dan menimbulkan korban di kalangan warga Palestina. Setelah serangkaian lobi dan diskusi, termasuk partisipasi delegasi DPR RI yang diwakili oleh Abdillah Toha, Sidang ke-118 IPU akhirnya menghasilkan Resolusi tentang peran parlemen dan Uni Parlemen Internasional dalam mengatasi situasi kemanusiaan yang memburuk dengan segera di area konflik dan dimensi lingkungan, memfasilitasi hak penentuan nasib sendiri bagi Palestina - terutama dengan mengakhiri blokade di Gaza - dan mempercepat pembentukan Negara Palestina melalui proses perdamaian yang layak (BKSAP DPR RI, 2009).

Upaya diplomasi parlemen Indonesia juga dilakukan pada level kerjasama bilateral. Hal tersebut dapat dilihat saat ketua DPR RI, Puan Maharani mengadakan pertemuan bilateral bersama parlemen Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia dalam rangka (MIKTA) *Speakers' Consultation* ke-9. Dalam pertemuan tersebut, Puan mendorong negara-negara MIKTA untuk mendukung solusi dua negara (*two-state*

solution) dalam konflik Israel-Palestina. Selain itu, ia juga mengajak negara-negara MIKTA untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga yang terdampak konflik (BKSAP DPR RI, 2023).

Indonesia menunjukkan dedikasinya terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan dengan mengalokasikan dana bantuan senilai 2 juta dolar AS untuk mendukung warga Palestina yang menjadi korban serangan Israel. Bantuan ini berfokus pada penyediaan obat-obatan dan peralatan medis, yang disalurkan melalui Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI). Puan Maharani, sebagai perwakilan parlemen Indonesia, secara tegas menyuarakan panggilan untuk menghentikan agresi militer Israel di Jalur Gaza, dengan sikap ini diutarakan dalam forum P20 ke-9 yang diselenggarakan di India. Bersama-sama dengan pemimpin parlemen dari Turki, China, Afrika Selatan, dan Rusia, Puan menyampaikan protes terhadap kesimpulan sidang G20, menunjukkan penolakan terhadap tindakan agresif tersebut (DPR RI, 2023).

Indonesia, sebagai negara demokratis dengan tradisi diplomasi damai dan keterlibatan aktif dalam isu-isu kemanusiaan, memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk berperan aktif dalam menangani krisis kemanusiaan di Gaza. Parlemen Indonesia, sebagai wakil rakyat, memiliki potensi besar untuk mengoptimalkan peran dan kontribusinya dalam upaya menyelesaikan konflik dan memitigasi dampak krisis di Gaza.

Seluruh upaya dan keterlibatan Indonesia dalam permasalahan ini sejalan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik

Indonesia Tahun 1945. Pembukaan tersebut menyatakan “bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Hal tersebutlah yang melandasi kepentingan Indonesia untuk turut serta dalam penyelesaian konflik yang berkepanjangan ini, mengentaskan krisis kemanusiaan yang terus menerus terjadi di Palestina, khususnya Jalur Gaza.

Berdasarkan urgensi kemanusiaan serta partisipasi aktif pemerintah Indonesia melalui parlemen dalam menyusun solusi-solusi terkait permasalahan di Gaza menjadi isu yang menarik untuk dibahas lebih lanjut. Berangkat dari hal tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh terkait "**Optimalisasi Diplomasi Parlemen Indonesia dalam Penanganan Krisis Kemanusiaan di Gaza.**"

1.2 Rumusan dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis akan berfokus pada optimalisasi diplomasi parlemen yang dilakukan oleh DPR RI sebagai aktor negara sekaligus lembaga legislatif tertinggi di Indonesia. DPR RI dinilai memiliki cakupan yang lebih luas dan efisien dalam penanganan isu internasional khususnya krisis kemanusiaan yang terjadi di Gaza. Keterlibatan langsung DPR RI dalam forum internasional memungkinkan tercapainya kepentingan nasional melalui diplomasi parlemen dengan lebih efektif.

Penelitian ini juga akan membatasi pembahasan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (2014-2024). Hal ini dikarenakan terdapat serangkaian upaya dan peran diplomasi parlemen dalam mendukung agenda kepentingan nasional di luar negeri. Fenomena ini termanifestasi melalui beragam inisiatif diplomasi, mencakup diplomasi ekonomi, perdamaian, dan kemanusiaan, di mana peran parlemen semakin aktif terlibat khususnya pada forum internasional. Selain itu, dalam rentang waktu tersebut krisis di Gaza mencapai angka tertinggi yakni 2,2 juta orang memerlukan bantuan kemanusiaan dikarenakan serangan yang terus menerus dilakukan oleh Israel di wilayah tersebut (Palestine Logistics Cluster, 2024).

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana optimalisasi diplomasi parlemen Indonesia dalam penanganan krisis kemanusiaan di Gaza?
2. Bagaimana peluang dan tantangan dalam pengimplementasian diplomasi parlemen Indonesia dalam penanganan krisis kemanusiaan di Gaza?

Untuk menjawab dua rumusan masalah di atas, maka penulis akan menggunakan konsep diplomasi parlemen dan krisis kemanusiaan yang akan dibahas lebih lanjut pada kerangka konseptual.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya optimalisasi diplomasi parlemen Indonesia dalam penanganan krisis kemanusiaan di Gaza.
2. Untuk mengetahui peluang dan tantangan dalam pengimplementasian diplomasi parlemen Indonesia dalam penanganan krisis kemanusiaan di Gaza.

Adapun manfaat dari penelitian ini, antara lain:

1. Manfaat bagi penulis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mendalam bagi penulis terkait fungsi diplomasi parlemen dan implementasinya khususnya dalam penanganan krisis kemanusiaan di Gaza.

2. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi serta menjadi bahan referensi bagi peneliti dengan fokus penelitian relevan kedepannya, khususnya kepada akademisi dan pengamat dalam memperkaya kajian terkait diplomasi parlemen Indonesia dalam penanganan krisis kemanusiaan di Gaza.

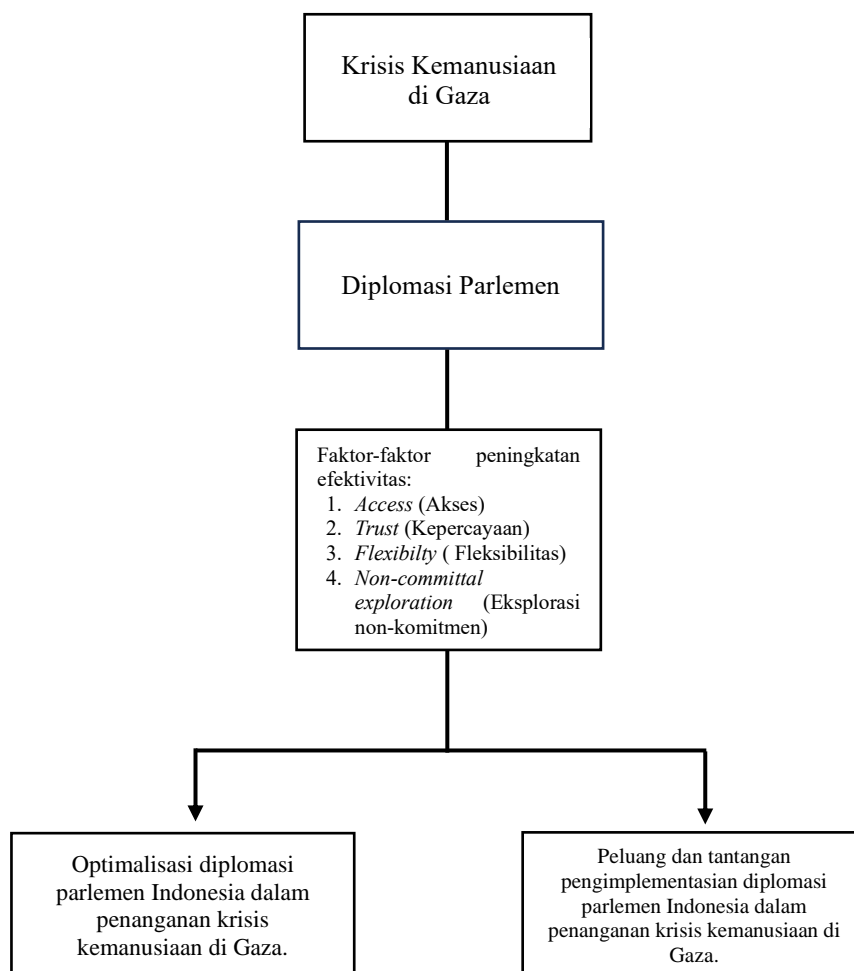
3. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi acuan berpikir dan bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam pengembangan diplomasi parlemen Indonesia, khususnya dalam penanganan krisis kemanusiaan di Gaza.

1.4 Kerangka Konseptual

Penelitian ini menggunakan dua konsep utama, yakni diplomasi parlemen dan krisis kemanusiaan sebagai acuan dan panduan dalam menentukan arah penelitian dan pembahasan. Adapun kerangka berpikir dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

Gambar 1.1 Bagan Kerangka Berpikir



1.4.1 Diplomasi Parlemen

Diplomasi dapat didefinisikan sebagai seni dan praktik melakukan negosiasi antara dua atau lebih kelompok untuk

mencapai tujuan tertentu (Bailey, 1962). Diplomasi parlemen, bagaimanapun, didefinisikan sebagai 'seluruh rentang kegiatan internasional yang dilakukan oleh anggota parlemen untuk meningkatkan pemahaman bersama antara negara-negara, saling membantu dalam meningkatkan pengendalian pemerintah dan representasi rakyat, serta meningkatkan legitimasi demokratis institusi antar-pemerintah (Weisglas & De Boer, 2007).

Seiring dengan perkembangan zaman dan kompleksitas masalah yang dihadapi oleh masyarakat internasional, termasuk munculnya isu-isu baru dalam hubungan internasional seperti lingkungan hidup, HAM, dan demokratisasi, peran aktor dalam kegiatan diplomasi tidak lagi terbatas pada diplomat pemerintah. Aktor-aktor di luar pemerintah juga dapat berperan dalam aktivitas diplomasi. Oleh karena itu, dalam studi hubungan internasional, konsep "diplomasi multi-jalur" (*multi-track diplomacy*) menjadi cukup terkenal (Diamond, 1996).

Diplomasi multi-jalur mengindikasikan bahwa mencapai suatu tujuan tidak hanya melalui cara formal yang melibatkan aktor-aktor pemerintah dalam aktivitas diplomasi. Peran dari aktor-aktor non-pemerintah juga harus diakui dan tidak boleh diabaikan, termasuk parlemen.

Meskipun diplomasi secara tradisional lebih banyak menjadi arena yang lebih atau kurang eksklusif untuk eksekutif,

ketidakjelasan antara apa yang bersifat nasional dan apa yang bersifat asing telah menyebabkan perlunya upaya lebih besar bagi anggota parlemen untuk mempertimbangkan dengan pola pikir global isu-isu yang dihadapkan pada mereka. Keterlibatan yang lebih besar oleh parlemen dalam urusan internasional ini, sebagian merupakan hasil dari apa yang secara memadai disebut sebagai 'globalisasi'(Weisglas & De Boer, 2007).

Weisglas & De Boer (2007) melihat di sisi lain, parlemen juga menyadari bahwa mereka tidak dapat lagi mengharapkan pemerintah untuk mengambil peran dan tanggung jawab tunggal dalam tindakan di luar negeri. Lebih dari sebelumnya, para anggota parlemen secara individu, dan parlemen sebagai institusi, diharuskan untuk berperan dalam menyelesaikan masalah-masalah kompleks yang memerlukan pendekatan multifaset.

Diplomasi parlemen, bagaimanapun, didefinisikan sebagai 'seluruh rangkaian kegiatan internasional yang dilakukan oleh anggota parlemen untuk meningkatkan pemahaman saling antar negara, saling membantu dalam meningkatkan pengendalian pemerintahan dan representasi rakyat, serta meningkatkan legitimasi demokratis lembaga antarpemerintah (Weisglas & De Boer, 2007).

Jeffrey Robertson mengidentifikasi beberapa keuntungan dari diplomasi parlemen yang dapat melengkapi diplomasi tradisional dan meningkatkan efektivitasnya. Faktor-faktor tersebut antara lain:

1. *Access* (Akses). Anggota parlemen, berkat posisinya, sering dapat memperoleh akses langsung ke para pengambil keputusan di negara-negara yang mereka kunjungi.
2. *Trust* (Kepercayaan). Dalam sebagian besar kasus, anggota parlemen adalah wakil yang terpilih. Oleh karena itu, mereka memiliki otoritas yang lebih besar sebagai perwakilan rakyat. Dibandingkan dengan diplomat yang merupakan perwakilan pemerintah, mereka dapat dianggap lebih dekat dengan sentimen publik.
3. *Flexibility* (Fleksibilitas). Karena status mereka sebagai pejabat terpilih, anggota parlemen juga memiliki fleksibilitas yang lebih besar untuk mengeksplorasi solusi alternatif dan inovatif terhadap masalah-masalah internasional di luar ruang kebijakan pegawai pemerintah. Mereka juga lebih mampu melibatkan organisasi non-pemerintah (LSM) untuk berkontribusi pada upaya mereka.
4. *Non-committal exploration* (Eksplorasi non-komitmen). Anggota parlemen dapat digunakan oleh pemerintah untuk melakukan eksplorasi tanpa kewajiban terhadap masalah-masalah internasional. Ini memungkinkan pemerintah memanfaatkan fleksibilitas, kepercayaan, dan akses diplomasi parlemen tanpa terlihat terikat pada opsi tertentu secara domestik atau internasional (Robertson, 2007).

Diplomasi parlemen memegang peranan penting dalam pengawasan terhadap proses-proses kebijakan luar negeri suatu negara. Fungsinya adalah untuk melindungi kepentingan nasional dan mendorong konsep kebijakan luar negeri yang diusung oleh negara tersebut. Perlu digarisbawahi bahwa diplomasi parlemen tidak beroperasi secara terpisah, melainkan menjadi bagian integral dari pencapaian tujuan-tujuan kebijakan luar negeri yang diterapkan oleh pemerintah (Majidi, 2021: 317)

1. 4. 2 Krisis Kemanusiaan

Krisis kemanusiaan didefinisikan sebagai sebuah peristiwa mendadak yang melibatkan tingkat penderitaan yang tinggi dan menempatkan kesejahteraan dasar manusia dalam bahaya secara besar-besaran (Internews, 2014). Krisis kemanusiaan juga digambarkan sebagai peristiwa atau serangkaian peristiwa yang merupakan ancaman kritis terhadap kesehatan, keselamatan, keamanan, atau kesejahteraan masyarakat atau kelompok besar lainnya, yang umumnya terjadi pada cakupan wilayah yang luas (Bloxham, 2022a).

Pada dasarnya krisis kemanusiaan dapat dikategorikan menjadi dua bagian, antara lain:

1. *Natural disaster* (bencana alam). Sebuah peristiwa alam mendadak yang secara serius memengaruhi sebuah komunitas dan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diatasi oleh

komunitas tersebut sendiri. Hal ini mengacu pada peristiwa atau kejadian yang disebabkan oleh kekuatan alam, seperti gempa bumi, tsunami, banjir, letusan gunung berapi, topan, atau kejadian alam lainnya yang dapat menyebabkan kerusakan signifikan terhadap lingkungan, harta benda, dan kehidupan manusia (UNISDR, 2009).

2. *Complex emergencies* (keadaan darurat yang kompleks). Krisis kemanusiaan yang mencakup kerusakan yang cukup besar pada otoritas akibat konflik internal atau eksternal. Krisis semacam ini seringkali melibatkan kombinasi faktor seperti konflik bersenjata, bencana alam, ketidakstabilan politik, krisis kesehatan, dan masalah kemanusiaan lainnya. Keadaan semacam itu cenderung memerlukan respons yang terintegrasi dan komprehensif dari berbagai sektor, termasuk bantuan kemanusiaan, keamanan, kesehatan, dan pembangunan, untuk mengatasi dampak yang kompleks dan serius terhadap masyarakat (OCHA, 2012).

Krisis kemanusiaan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti konflik bersenjata, bencana alam, ketidakamanan pangan, dan populasi yang terdislokasi. Krisis kemanusiaan seringkali kompleks dan saling terkait, dan masing-masing memerlukan respons yang unik yang ditargetkan pada sektor-sektor tertentu. Dampak dari krisis kemanusiaan sangat merusak bagi masyarakat yang terkena, baik dalam jangka pendek maupun

jangka panjang, termasuk keruntuhan sosio-ekonomi, kerusakan lingkungan dan ekologis, serta dampak kesehatan mental dan fisik (Bloxham, 2022a).

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengandalkan data yang diperoleh peneliti dari sejumlah literatur dalam menganalisis optimalisasi diplomasi parlemen Indonesia dalam penanganan krisis kemanusiaan di Gaza. Penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman dan interpretasi fenomena sosial dalam konteks alamiahnya serta menggunakan data dalam bentuk naratif atau deskriptif. Penelitian kualitatif atau *qualitative research*, adalah metode penelitian yang menghasilkan temuan-temuan yang tidak dapat diperoleh melalui penggunaan prosedur statistik atau melalui pendekatan kuantitatif lainnya (Farida, 2014: 4).

1.5.2 Jenis Data

Penelitian ini menggunakan sumber data yang relevan dengan fokus penelitian yang sedang dikaji. Sumber data primer dalam penelitian ini mencakup laporan delegasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Badan Kerja Sama Antar Parlemen. Sementara itu, sumber data sekunder berasal dari berbagai literatur, jurnal, arsip, dokumen pemerintah, tesis, dan

karya penelitian lainnya, termasuk media massa konvensional dan online, serta materi video.

1. 5. 3 Teknik Pengumpulan Data

Library research (studi pustaka) dilakukan sebagai teknik pengumpulan data. Studi pustaka juga dikenal sebagai studi literatur atau tinjauan literatur, adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan pencarian, penjelajahan, dan analisis beraneka ragam sumber informasi, seperti jurnal ilmiah, majalah, surat kabar, buku dan dokumen, untuk mengumpulkan data dan pengetahuan tentang upaya diplomasi yang dilakukan oleh parlemen Indonesia sehubungan dengan penanganan krisis kemanusiaan di Gaza. Penelitian kepustakaan berbeda dengan metode penelitian lain yang membutuhkan observasi atau wawancara untuk mengumpulkan data. Tujuan penelitian kepustakaan adalah untuk menggali teori dan konsep dasar yang telah ditemukan oleh peneliti sebelumnya, mengikuti perkembangan penelitian pada bidang tertentu, serta mengidentifikasi kesenjangan dan permasalahan penelitian (M. Sari & Asmendri, 2020).

1. 5. 4 Teknik Analisis Data

Analisis data deskriptif merupakan teknik yang diterapkan oleh penulis dalam penulisan *research essay* ini. Teknik analisis data deskriptif adalah teknik analisis data yang digunakan penulis untuk menggambarkan, meringkas, dan mengidentifikasi pola data yang

ada. Teknik ini terbagi menjadi dua yaitu teknik analisis data deskriptif kuantitatif dan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Proses analisis dalam penelitian deskriptif yaitu, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data. Teknik ini menekankan pada penejelasan tentang sebab asal muasal sebuah kasus berdasarkan fakta yang ada dan hasil penelitiannya disajikan dalam bentuk deskripsi (Snyder, 2019).

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, penulis akan mengkaji tiga konsep utama yang menjadi landasan penelitian, yaitu *multi-track diplomacy*, diplomasi parlemen, dan krisis kemanusiaan. Bab ini akan menjelaskan secara mendalam kedua konsep tersebut, memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai peran dan fungsi diplomasi parlemen dalam konteks hubungan internasional serta dinamika krisis kemanusiaan yang menjadi isu global. Selain itu, penulis akan memaparkan sejumlah penelitian terdahulu yang relevan, guna memberikan landasan teori yang kokoh serta mengidentifikasi celah-celah penelitian yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini.

2.1 Multi-track Diplomacy

Multi-Track Diplomacy (MTD) adalah pendekatan diplomasi yang melibatkan berbagai saluran atau "jalur" untuk mencapai perdamaian. Konsep ini diperkenalkan oleh Louise Diamond dan John McDonald yang mengembangkan model yang memperluas konsep diplomasi tradisional yang umumnya hanya melibatkan pemerintah (*track one*) untuk memasukkan aktor-aktor non-pemerintah (*tracks two* sampai *nine*). Pendekatan ini menekankan pentingnya kerjasama dan kolaborasi antara berbagai aktor untuk menciptakan perdamaian yang berkelanjutan (Mujiono & Alexandra, 2019).

Model MTD terdiri dari sembilan track atau jalur, yaitu:

1. *Track One: Government.* Diplomasi formal yang dilakukan oleh perwakilan pemerintah.
2. *Track Two: Non-Government/Professional.* Inisiatif perdamaian yang dilakukan oleh individu atau kelompok profesional yang tidak berafiliasi langsung dengan pemerintah.
3. *Track Three: Business.* Peran sektor bisnis dalam mendorong perdamaian melalui perdagangan dan investasi.
4. *Track Four: Private Citizens.* Keterlibatan individu dalam upaya perdamaian melalui hubungan personal.
5. *Track Five: Research, Training, and Education.* Kontribusi akademisi dan lembaga pendidikan dalam mempromosikan pemahaman dan keterampilan yang diperlukan untuk perdamaian.
6. *Track Six: Activism.* Aktivitas kelompok masyarakat sipil yang bertujuan mendorong perubahan sosial dan politik untuk mencapai perdamaian.
7. *Track Seven: Religion.* Peran pemimpin dan kelompok agama dalam mempromosikan perdamaian melalui ajaran dan kegiatan spiritual.
8. *Track Eight: Funding.* Penyediaan sumber daya finansial untuk mendukung inisiatif perdamaian.
9. *Track Nine: Communications and Media.* Penggunaan media massa untuk menyebarkan pesan perdamaian dan membangun opini publik yang mendukung (Mujiono & Alexandra, 2019).

Implementasi MTD memerlukan koordinasi dan kolaborasi antara berbagai track untuk memaksimalkan efektivitasnya. Setiap track memiliki peran unik dan dapat memberikan kontribusi yang berbeda terhadap upaya perdamaian. Misalnya, diplomasi formal oleh pemerintah (Track One) dapat diimbangi oleh inisiatif non-pemerintah (Track Two) yang lebih fleksibel dan inovatif (Mujiono & Alexandra, 2019).

Selain itu, sektor bisnis (Track Three) dapat mendukung stabilitas ekonomi yang penting untuk perdamaian, sementara pendidikan dan penelitian (Track Five) dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk resolusi konflik. Aktivisme (Track Six) dan agama (Track Seven) dapat membangun kesadaran dan dukungan di tingkat akar rumput, sementara pendanaan (Track Eight) dan media (Track Nine) memastikan bahwa upaya perdamaian memiliki sumber daya yang cukup dan didukung oleh opini publik yang positif (Mujiono & Alexandra, 2019).

Buku "Multi-Track Diplomacy: Teori dan Studi Kasus" tahun 2019 karya Dadang I. K. Mujiono dan Frisca Alexandra memberikan beberapa contoh studi kasus yang mengilustrasikan penerapan MTD di berbagai konteks. Studi kasus ini menunjukkan bagaimana berbagai track dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan perdamaian. Salah satu contoh adalah keterlibatan berbagai aktor dalam penyelesaian konflik di Aceh, Indonesia, di mana pemerintah, LSM, akademisi, dan kelompok agama semuanya memainkan peran penting dalam proses perdamaian.

MTD menawarkan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami dan mengimplementasikan upaya perdamaian yang melibatkan berbagai aktor. Dengan mengakui dan memanfaatkan kontribusi unik dari setiap track, MTD dapat menciptakan pendekatan yang lebih inklusif dan efektif untuk menyelesaikan konflik dan membangun perdamaian yang berkelanjutan.

2.2 Diplomasi Parlemen

Secara etimologis, istilah "diplomasi" berasal dari kata Yunani "diploun" yang berarti melipat. Asal kata ini merujuk pada praktik yang umum terjadi pada masa Kekaisaran Romawi di mana paspor dan surat-surat perjalanan untuk melintasi wilayah negara dicetak pada piringan logam ganda, kemudian dilipat dan disatukan. Piringan logam ini yang kemudian disebut sebagai "diplomasi" (A. Setiawan, 2016).

Dalam kehidupan sehari-hari, istilah diplomasi seringkali disebutkan dalam konteks hubungan internasional. Misalnya, media sering menggunakan kata diplomasi untuk merujuk pada politik luar negeri suatu negara, seperti yang terlihat dalam pernyataan: "Diplomasi Indonesia terhadap negara-negara anggota Uni Eropa diarahkan untuk meningkatkan kerjasama dalam rangka pemulihan ekonomi nasional." Di samping itu, diplomasi juga dapat diartikan sebagai proses negosiasi atau perundingan, seperti yang dijelaskan dalam kalimat: "Konflik di Timur Tengah harus diselesaikan dengan cara-cara diplomasi." (H.E Ramli, 2016)

Menurut Sir Earnest Satow dalam (Booth, Lord Gore, 1979), diplomasi memiliki definisi yang lebih dinamis dengan menyertakan pencapaian kedamaian sebagai tujuan utama. Dalam pandangannya, diplomasi merupakan usaha yang bertujuan untuk mencapai perdamaian, seperti yang tercermin dalam pernyataan berikut.

Diplomacy is the application of intelligence and tact to the conduct of official relations between governments of independent state, extending sometimes also their relation with vassal states, or, more briefly still, the conduct of business between states by peaceful means.

Menurut Hans J. Morgenthau dalam (A. Setiawan, 2016) “*Diplomacy is the promotion of the national interest by peaceful means*”. Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa diplomasi melibatkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan luar negeri di semua tingkat, mulai dari yang paling tinggi hingga yang paling rendah. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan dalam lingkup negara melibatkan para pemangku kepentingan tidak hanya lembaga eksekutif tetapi juga legislatif.

Diplomasi merupakan instrumen utama dalam menjaga hubungan antarnegara, menyelesaikan konflik, dan mempromosikan kerja sama internasional. Sementara diplomat dan pejabat pemerintah biasanya menjadi ‘wajah’ yang paling terlihat dalam proses diplomasi, peran parlemen juga semakin diakui dalam arena diplomasi internasional. Dengan kemampuannya dalam mewakili kepentingan nasional dan mengawasi

kebijakan pemerintah, parlemen memiliki potensi besar untuk memperkuat hubungan internasional dan mempengaruhi arah kebijakan luar negeri. Dalam konteks ini, tinjauan terhadap diplomasi parlemen menjadi relevan dan penting untuk dipahami lebih dalam.

Diplomasi parlemen merupakan perspektif penting dan bentuk diplomasi alternatif, meskipun belum banyak diteliti secara luas, yang dikembangkan belakangan ini oleh peran yang semakin meningkat dari Parlemen dan keterlibatannya dalam urusan luar negeri dan masalah hubungan internasional. Secara umum, masalah-masalah ini dianggap sebagai kompetensi eksklusif dari Kementerian Luar Negeri dan masing-masing menterinya, termasuk peran utama perdana menteri sebagai aktor politik utama dari pemerintah atau cabang eksekutif (Hallunaj, 2005).

Pada saat yang sama, duta besar atau bentuk diplomasi lainnya seperti diplomasi budaya dianggap sebagai instrumen utama untuk mengembangkan dan mempromosikan hubungan internasional antara negara-negara. Namun demikian, parlemen mewakili beragam isu yang kompleks terkait dengan peran yang mereka mainkan dalam masalah-masalah luar negeri. Kompetensi-kompetensi ini memberikan kekuatan penting kepada parlemen dalam proses diplomasi atau urusan luar negeri. Diplomasi parlemen adalah cara di mana dua atau lebih parlemen melakukan dialog yang berkelanjutan mengenai isu-isu internasional yang bersifat vital (Hallunaj, 2005).

Salah satu definisi yang valid ditawarkan oleh Weiglas dan de Boer (2007, hal. 93-4): “rangkaiian lengkap aktivitas internasional yang dilakukan oleh para anggota parlemen untuk meningkatkan pemahaman antar negara, membantu sama lain dalam meningkatkan pengendalian pemerintah dan representasi suatu bangsa, serta untuk meningkatkan legitimasi demokratis institusi antar-pemerintah.”

Secara umum, sebagian besar parlemen telah mulai menyesuaikan strategi operasional mereka untuk mendapatkan posisi yang lebih menguntungkan dalam menangani agenda internasional. Meskipun beberapa lembaga sudah menerapkan perubahan tersebut, ada yang masih berada dalam tahap perdebatan. Terdapat beragam kegiatan institusional yang sedang dilakukan di parlemen-parlemen di seluruh dunia, dengan tujuan untuk mendekatkan diri ke ranah multilateral. Meskipun memiliki peran konstitusional penting dalam proses ratifikasi perjanjian internasional, pengaruh parlemen dalam proses ratifikasi masih cukup terbatas. Sebagai contoh, mereka jarang mengambil langkah-langkah untuk mempercepat proses ratifikasi. Namun, setelah suatu perjanjian internasional disetujui, peran parlemen menjadi sangat signifikan dalam memastikan pelaksanaannya (IPU, 2005).

Parlemen memasuki diplomasi dalam tiga cara utama: 1- dengan memengaruhi kebijakan luar negeri melalui parlemen, 2-dengan mendirikan majelis parlemen sebagai badan perwakilan organisasi regional dan internasional, dan 3-Mengelola hubungan diplomatik dengan pemerintah

dan aktor non-pemerintah lainnya. Stavridis mencantumkan berbagai contoh dari apa yang disebutnya sebagai diplomasi parlemen:

1. Aktivitas multilateral organisasi parlemen internasional,
2. Kelompok parlemen bilateral dan khususnya kelompok pemerintah,
3. Perjanjian internasional antara parlemen,
4. Aktivitas komite urusan luar negeri parlemen,
5. Sidang pleno yang menangani pertanyaan kebijakan luar negeri,
6. Partisipasi parlemen dalam proses pemantauan pemilihan (Stavridis, 2006).

Implementasi diplomasi parlemen bervariasi di setiap negara tergantung pada sistem politik, budaya, dan peran parlemen dalam urusan luar negeri. Setiap negara memiliki pendekatan yang unik dalam menerapkan diplomasi parlemen sesuai dengan kebutuhan dan konteksnya sendiri. Meskipun peran parlemen dalam diplomasi mungkin tidak selalu sekuat peran pemerintah, mereka tetap berperan dalam mempengaruhi kebijakan luar negeri, mempromosikan kerja sama internasional, dan memperkuat hubungan antarnegara.

Eropa merupakan salah satu wilayah dengan perkembangan diplomasi parlemen yang cukup signifikan. Kelompok politik Parlemen Eropa (EP) memainkan peran diplomatik dalam hal kekuasaan legislasi EP, peran retorik mereka dalam kebijakan luar negeri Uni Eropa (UE), dan melalui tindakan diplomatik langsung di negara-negara ketiga (Fiott, 2015). Jika melihat secara keseluruhan badan parlemen regional dan transnasional

“hanya Parlemen Eropa yang telah mengembangkan karakter yang benar-benar supranasional dan memiliki kekuatan yang efektif” (Malamud & Stavridis, 2016).

Dari analisis yang telah dilakukan sebelumnya, jelas bahwa kelompok-kelompok EP terus-menerus bernegosiasi dan menjaga saluran komunikasi terbuka dengan kelompok dan individu di negara-negara ketiga. Dalam hal ini, kelompok-kelompok tersebut tampaknya "melakukan" diplomasi tradisional meskipun mereka tidak mewakili sebuah negara atau memiliki sumber daya yang tersedia bagi kementerian luar negeri. Memang, sumber daya yang tersedia bagi anggota parlemen umumnya datang dalam bentuk pengetahuan. Kita tidak boleh mengabaikan fakta bahwa banyak anggota Parlemen Eropa (MEP) adalah mantan perdana menteri, mantan menteri luar negeri, dan pejabat sipil tingkat tinggi seperti sekretaris negara. Dengan membagi antara "diplomasi legislatif", "diplomasi retorik", dan "diplomasi aktif", makalah ini telah menunjukkan bagaimana kelompok dan partai memainkan peran yang beragam, meskipun berbeda-beda, dalam CFSP UE. Meskipun sebagian besar diplomasi parlemen kelompok EP tetap bersifat retorik, makalah ini telah menunjukkan bahwa para pelaku ini menggunakan mekanisme legislatif untuk mempengaruhi CFSP dan mereka berpartisipasi dalam kunjungan delegasi, pertemuan antarparlemen, dan Misi Pemantauan Pemilihan (EOM).

Dalam konteks keseluruhan *EU's Common Foreign and Security Policy* (CFSP) jelas bahwa kelompok-kelompok EP memainkan peran yang

marginal, namun ini hanya jika dibandingkan dengan apa yang dapat dicapai oleh pemerintah dan lembaga-lembaga UE. Perbandingan ini mungkin tidak tepat, karena diplomasi parlemen mungkin seharusnya tidak dilihat sebagai pengganti diplomasi tradisional, melainkan sebagai pelengkap. Kelemahan diplomatis yang terkait dengan kelompok-kelompok - kurangnya sumber daya, didorong oleh ideologi, dan bukan merupakan negara - mungkin sebenarnya menjadi kekuatan utama mereka. Memang, nilai tambah dari kelompok-kelompok dan partai adalah bahwa mereka tidak terlalu terkait dengan pemerintah, yang mungkin meningkatkan legitimasi mereka di mata pihak ketiga dalam situasi krisis. Bahkan, para anggota parlemen mungkin dapat berkomunikasi melalui saluran dan dengan kelompok dan individu yang mungkin tidak terbuka bagi diplomat. Dalam hal ini, mencengangkan bahwa ketika UE menyebut "pendekatan komprehensif", hal tersebut terutama dipertimbangkan dengan diplomat nasional, pejabat *European External Action Service* (EEAS), dan spesialis bantuan pembangunan dalam pikiran. Mungkin sudah waktunya bagi para anggota parlemen untuk memainkan peran yang lebih besar dalam CFSP UE (Fiott, 2015).

Parlemen Amerika Latin adalah sebuah majelis unicameral yang terdiri dari anggota-anggota dari 22 parlemen nasional di Amerika Latin dan Karibia, yaitu dari Argentina, Aruba, Bolivia, Brasil, Chili, Kolombia, Kosta Rika, Kuba, Republik Dominika, Ekuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Meksiko, Antillen Belanda, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru,

Suriname, Uruguay, dan Venezuela. Didirikan di Lima, Peru, pada tahun 1964 dengan tujuan untuk mempromosikan demokrasi domestik dan integrasi regional, parlemen ini diresmikan pada tahun 1987. Dari tahun 1992 hingga 2008, parlemen ini berlokasi di São Paulo, Brasil, dan setelahnya di Kota Panama (Malamud & Stavridis, 2016).

The Latin American Parliament (PARLATINO) terdiri dari delegasi nasional yang dikirim oleh parlemen anggota, masing-masing dapat menunjuk hingga 12 perwakilan dalam proporsi yang mencerminkan kekuatan kelompok parlemen nasional. Sebuah delegasi dapat memiliki kurang dari 12 anggota, dalam hal ini setiap delegasi dapat memberikan hingga empat suara hingga mencapai jumlah total 12; ketentuan ini memberikan semua negara kekuatan suara yang sama terlepas dari populasi dan kehadiran. PARLATINO berkumpul sekali setahun, dan tidak memiliki otoritas pengambilan keputusan serta membatasi diri pada penerbitan deklarasi dan rekomendasi yang tidak mengikat. Prestasi sejarah utamanya adalah memberikan perlindungan bagi para pemimpin politik demokratis dan aspirasi selama era kelam pemerintahan diktator. Karena terdiri dari anggota parlemen nasional, bersifat antar pemerintah, tidak memiliki kompetensi legislatif, dan hampir kontinental dalam cakupan, PARLATINO lebih menyerupai Majelis Parlemen Dewan Eropa daripada Parlemen Eropa (EP). Tidak seperti parlemen regional yang dibahas di bawah ini, PARLATINO unik karena berdiri secara independen dan tidak menjadi bagian dari organisasi yang lebih luas (Malamud & Stavridis, 2016).

Di benua Afrika, parlemen di berbagai negara menunjukkan keragaman yang mencerminkan sejarah, budaya, dan sistem politik masing-masing. Setiap parlemen memiliki karakteristik dan identitas unik yang memainkan peran penting dalam pembentukan kebijakan, pengawasan pemerintahan, dan representasi rakyat. Salah satu parlemen yang cukup berpengaruh di benua ini, yakni *East African Legislative Assembly* (EALA).

EALA adalah sebuah organ yang didirikan berdasarkan Pasal 9 Perjanjian Komunitas Afrika Timur (EAC). Sebagai badan legislatif dari organisasi regional ini, EALA memiliki mandat untuk melakukan fungsi pengawasan, representasi, dan legislasi atas semua urusan EAC. Majelis ini terdiri dari lima puluh dua anggota, yang mencakup sembilan legislator dari masing-masing negara mitra serta tujuh anggota *ex-officio*. Anggota *ex-officio* ini meliputi Menteri atau Sekretaris Kabinet yang bertanggung jawab atas urusan EAC dari setiap negara mitra, Sekretaris Jenderal, dan Penasihat Komunitas (EALA, 2002).

Fungsi pengawasan Majelis melibatkan pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan serta program yang diadopsi oleh EAC, untuk memastikan bahwa mereka sejalan dengan tujuan strategis organisasi. Fungsi representasi mencakup keterlibatan dengan warga negara di negara-negara mitra untuk memastikan bahwa aspirasi dan kepentingan mereka terwakili dalam proses legislatif. Fungsi legislasi melibatkan pembuatan dan pengesahan undang-undang yang diperlukan untuk mendukung integrasi regional dan kerjasama antara negara-negara anggota EAC.

Dengan struktur yang komprehensif dan berbagai komite spesialis, Majelis Legislatif Afrika Timur berfungsi sebagai pilar penting dalam memastikan keberhasilan dan kesinambungan integrasi regional di Afrika Timur. Hal ini menunjukkan bagaimana kerjasama regional dapat dikelola melalui kerangka legislatif yang solid, yang didukung oleh mekanisme pengawasan yang ketat dan keterlibatan yang inklusif dengan seluruh pemangku kepentingan (EALA, 2002).

2.3 Krisis Kemanusiaan

Penyebaran luas dan penggunaan istilah “krisis” secara berlebihan jelas membutuhkan analisis kritis (Milchman & Rosenberg, 2005). Pertama-tama, jika istilah “krisis” umumnya digunakan untuk menggambarkan situasi gangguan dalam keadaan yang sebelumnya stabil dan dikaitkan dengan bahaya yang mendesak yang memerlukan tindakan segera, kita harus menyadari bahwa dalam konteks migrasi ilegal ke-dan-di seluruh Eropa, perbedaan antara apa yang dianggap “stabil” dan “dalam krisis” sangat rapuh dan meragukan. Migrasi ilegal di Eropa adalah efek yang dapat diprediksi dan tak terelakkan dari sistem migrasi yang membatasi mobilitas sebagian besar orang dari berbagai belahan dunia. Sistem migrasi ilegal ini sangat beragam dan luas secara geografis serta bertahan lama. Selain itu, sistem ini beroperasi melalui dugaan “kegagalan” berbagai negara untuk mencegah keluar masuknya migran dan pengungsi yang tidak memiliki hak hukum untuk masuk ke wilayah negara-negara tersebut. Keadaan “krisis” terkait migrasi ilegal di perbatasan UE adalah norma, bukan pengecualian,

dan pengelolaan migrasi ilegal yang terlihat kacau namun sebenarnya rutin tampaknya beroperasi melalui “krisis” dan juga berada dalam krisis permanen itu sendiri (De Genova & Tazzioli, 2015).

Demikian pula, “krisis” keuangan global tahun 2007–2008 dan dampaknya yang berkelanjutan di UE dan Zona Euro lebih baik dipahami sebagai bagian dari fungsi normal kapitalisme yang mengganggu dan merusak, daripada sesuatu yang tidak terduga atau tidak dapat dipahami. Seperti yang dijelaskan oleh David Harvey, “krisis sangat penting untuk kelangsungan kapitalisme. Dalam masa krisis, ketidakstabilan kapitalisme dihadapi, dibentuk kembali, dan direkayasa ulang untuk menciptakan versi baru dari kapitalisme”(Harvey, 2017). Selain itu, kekacauan perang dan perang sipil yang terus berlangsung di banyak wilayah dunia, khususnya di Timur Tengah dan Afrika, hanya dapat dipahami sebagai hasil yang sangat dapat diprediksi dari pendudukan kolonial dan intervensi militer neokolonial selama lebih dari satu abad terakhir (Gregory, 2004).

Oleh karena itu, kita harus bertanya: Kapan Timur Tengah tidak “dalam krisis”? Kapan Afrika tidak “dalam krisis”? Meskipun kita harus berhati-hati untuk tidak mengulang kembali stereotip kolonialis dan orientalis yang mengaitkan kekerasan dan ketidakstabilan dengan wilayah-wilayah ini, sangat penting untuk menyoroti bahwa kekerasan dan ketidakstabilan ini lebih disebabkan oleh warisan konflik yang rumit dan realitas sosial serta politik yang terus berlanjut akibat imperialisme Eropa

(dan Amerika) serta efek destabilisasinya yang mendalam (De Genova & Tazzioli, 2015).

Menurut *Oxford Learner's Dictionary*, krisis didefinisikan sebagai “suatu masa yang penuh bahaya, kesulitan, atau keraguan besar di mana masalah harus diselesaikan atau keputusan penting harus diambil”. Dalam ilmu sosial, krisis sering dianggap sebagai peristiwa yang berpotensi menyebabkan perubahan besar yang merugikan pada sistem sosial dan di mana terdapat ketidakproporsionalan antara peristiwa dan konsekuensinya. Definisi ini menekankan dampak tidak seimbang dari krisis terhadap masyarakat, yang dapat menyebabkan perubahan signifikan dalam sistem sosial (Walby, 2022).

Salah satu bentuk krisis yang kini menjadi polemik di seluruh belahan dunia adalah *humanitarian crisis* (krisis kemanusiaan). Krisis kemanusiaan dapat didefinisikan sebagai suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang menimbulkan ancaman kritis terhadap kesehatan, keselamatan, keamanan, atau kesejahteraan suatu komunitas atau kelompok besar individu di area yang luas. Istilah "krisis kemanusiaan" sering disinonimkan dengan "darurat kemanusiaan," yang menekankan perlunya intervensi segera untuk mengurangi dampak langsung maupun jangka panjang pada komunitas yang terdampak (Bloxham, 2022b).

Krisis kemanusiaan umumnya diidentifikasi ketika satu atau lebih kejadian menyebabkan populasi atau sebagian dari populasi suatu negara kehilangan akses terhadap kebutuhan dasar seperti air, makanan, tempat

tinggal, perawatan medis, dan pendidikan, yang kemudian mengancam kesehatan dan keamanan jangka panjang masyarakat tersebut. Jenis-jenis kejadian ini dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok, yang akan diuraikan lebih lanjut dalam bagian berikut.

1. Bencana Alam (*Natural Disasters*)

Bencana alam adalah bencana yang terjadi sebagai hasil dari aktivitas dalam proses alami bumi. Peristiwa bencana alam diproyeksikan akan terus meningkat karena beberapa faktor yang signifikan: (1) variasi dalam siklus alami seperti solar maxima, gempa bumi, dan aktivitas vulkanik; (2) pemanasan global, yang dapat meningkatkan frekuensi dan intensitas badai memetakan serta kekeringan di berbagai wilayah; (3) peningkatan keragaman penyakit dan penyakit yang ditularkan oleh vektor akibat perubahan iklim; serta (4) perubahan musim, kondisi cuaca, suhu, dan kelembaban lingkungan, yang secara negatif mempengaruhi cadangan makanan, produksi zat alergen, dan masalah kesehatan manusia (Hogan, 2019).

Bencana alam dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori utama (Keim, 2015):

a. Bencana Akibat Kejadian Biologis (*Biological Disasters*):

Bencana ini disebabkan oleh patogen bakteri atau virus yang dapat muncul dalam bentuk pandemi, wabah, atau epidemi penyakit menular. Menurut *Dictionary of Disaster Medicine and Humanitarian Relief*, bencana biologis adalah bencana yang

disebabkan oleh paparan biomassa atau organisme hidup dalam jumlah besar terhadap zat-zat beracun, bakteri, atau radiasi (S. W. A. Gunn, 2017)

b. Bencana Akibat Kejadian Hidro-Meteorologik (Hydro-Meteorological Disasters): Bencana ini dapat terjadi karena curah hujan yang tinggi atau rendah. Contoh bencana akibat curah hujan tinggi meliputi banjir dan badai, seperti badai siklon tropis, tornado, badai angin, dan badai salju. Sementara itu, bencana akibat curah hujan rendah mencakup kekeringan (yang kadang disertai dengan badai debu), kebakaran hutan yang tidak terkendali, dan gelombang panas.

c. Bencana Akibat Kejadian Geofisika (Geo-Physical Disasters): Bencana ini disebabkan oleh energi yang dihasilkan dari berbagai kejadian geofisika dan terbagi menjadi tiga jenis:

1. Bencana Seismik: Termasuk gempa bumi dan tsunami.
2. Bencana Vulkanik: Termasuk erupsi gunung berapi dan aliran lava gunung.
3. Bencana Gravitasi: Meliputi longsor, termasuk longsoran puing, longsor lumpur, longsoran lahar vulkanik, dan longsoran salju.

2. Bencana Buatan Manusia (*Man-made Disasters*)

Bencana akibat manusia, yang juga dikenal sebagai "*man-made disaster*" atau "*natural-induced disaster*" (Barton, 2009). Kategori ini

merupakan peristiwa bencana yang dihasilkan dari kesalahan manusia atau tindakan jahat. Bencana ini terjadi sebagai konsekuensi dari aktivitas manusia yang ketika dilakukan, sering kali diabaikan dengan asumsi bahwa jika bencana tersebut terulang, masyarakat akan mampu mencegahnya (Heryana, 2020).

Bencana buatan manusia sering kali memerlukan respons darurat yang cepat dan terkoordinasi untuk mengurangi dampaknya dan membantu pemulihan komunitas yang terdampak. Berikut tabel 2.1 yang mendeskripsikan jenis bencana ini.

Tabel 2. 1 Bencana Akibat Ulah Manusia (Manmade Disaster)

No	Jenis Bencana	Contoh
1	Serangan teroris	a. Serangan teroris di Munich Jerman (1972), New York (1993), Oklahoma (1995), Nine Eleven (2001); b. Teror anthrax di AS (2001)
2	Kecelakaan akibat industri	a. Tumpahan minyak di teluk Persia (1991), di Perancis (1978), Alaska (1989) b. Ledakan industri di Monongah Pennsylvania (1907), di Halifax Canada (1917), di Texas (1947) c. Keracunan limbah merkuri di Irak (1971) d. Ledakan gas di Cleveland, Ohio (1944) e. Tumpahan Dioksin di Seveso Italia (1976) f. Tenggelamnya anjungan minyak di Canada (1982) g. Keracunan gas di Bhopal India (1984) h. Ledakan pesawat ulang alik Challenger di Florida (1986)
3	Konflik sosial	a. Revolusi Rusia di St Petersburg (1905); b. Pembantaian massal di Nanking (1937), lapangan Tiananmen China (1989); c. Pembantaian etnis di Rwanda (1994), Bosnia-Herzegovnia (1995); Bom nuklir di Horishima-Nagasaki (1945)

4	Human error	<ul style="list-style-type: none"> a. Kebakaran di Roma Italia (64), London Inggris (1666), Illinois Chicago (1871); bioskop di Chicago (1903) b. Kelaparan di Bengal India (1770) c. Longsor di Turtle Mountain Canada (1903), di Aberfan Inggris d. Tenggelamnya kapal Titanic (1912) e. Bendungan runtuh di St Francis Dam (1928), Vaiont Dam di Italia(1963), Teton Dam Idaho, AS (1976) f. Pasar saham kolaps (1929) g. Kabut asap di London (1952) h. Tragedi Talidomid (1957) i. Kontaminasi air di Love Canal New York (1978)
---	-------------	--

sumber : (A. M. Gunn, 2008)

3. Keadaan Darurat Kompleks (*Emergencies Complex*)

Keadaan darurat kompleks dihasilkan dari kombinasi bencana buatan manusia dan bencana alam. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan keadaan darurat kemanusiaan kompleks sebagai “krisis kemanusiaan di sebuah negara, wilayah, atau masyarakat di mana terdapat keruntuhan total atau signifikan dari otoritas yang diakibatkan oleh konflik internal atau eksternal dan yang memerlukan respons internasional yang melampaui mandat atau kapasitas dari program negara PBB mana pun yang tunggal dan/atau yang sedang berlangsung.”(IASC, 1994).

Keadaan darurat kompleks dapat didefinisikan sebagai krisis kemanusiaan di negara, wilayah, atau masyarakat di mana terjadi keruntuhan otoritas yang total atau signifikan akibat konflik internal atau eksternal, dan yang memerlukan respons internasional yang

melampaui mandat atau kapasitas dari setiap lembaga tunggal dan/atau program negara yang sedang berjalan dari PBB (UNHCR, 2001).

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) turut menjelaskan karakteristik yang mungkin terjadi pada keadaan darurat kompleks, antara lain:

1. Sejumlah besar korban sipil, populasi yang dikepung atau dipindahkan, penderitaan manusia dalam skala besar;
2. Bantuan internasional yang substansial dibutuhkan dan respons tersebut melampaui mandat atau kapasitas dari satu lembaga saja;
3. Pemberian bantuan kemanusiaan dihalangi atau dicegah oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik;
4. Risiko keamanan yang tinggi bagi pekerja bantuan yang memberikan bantuan kemanusiaan;
5. Pekerja bantuan ditargetkan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik.

The Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) adalah badan PBB yang bertanggung jawab untuk memperkuat koordinasi bantuan kemanusiaan PBB dalam keadaan darurat kompleks. OCHA memiliki tiga fungsi utama dalam bidang ini: koordinasi respons kemanusiaan, pengembangan kebijakan, dan advokasi isu-isu kemanusiaan. OCHA biasanya mengoordinasikan persiapan Permohonan Konsolidasi dari sistem PBB untuk situasi semacam itu (UNHCR, 2001).

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini pada dasarnya tidak terlepas dari hasil penelitian terdahulu yang berperan sebagai acuan dan bahan perbandingan. Adapun pembahasan dan hasil yang diperoleh tidak terlepas dari beragam upaya yang telah dilakukan oleh Indonesia dalam mengimplementasikan diplomasi parlemennya khususnya terkait krisis kemanusiaan di Gaza.

Pertama, penelitian yang dilakukan Muhammad Irsyad Fadhlurrahman pada tahun 2022 dengan judul “Diplomasi Parlemen Indonesia dalam Menolak Rencana Aneksasi Israel atas Palestina Tahun 2020” berfokus dalam menjelaskan peran diplomasi parlemen Indonesia dalam menolak rencana aneksasi Israel atas Palestina di wilayah Tepi Barat pada tahun 2020. Perbedaan mendasar penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah pada variabel dependen. Penulis berfokus mengenai penanganan krisis kemanusiaan di Gaza, sedangkan penelitian tersebut berfokus pada aneksasi Israel terhadap Palestina.

Penelitian tersebut melihat isu ini dari dua kerangka pemikiran yang berbeda. Pertama, dari kerangka kebijakan luar negeri, politik domestik Indonesia melalui DPR RI mempengaruhi arah kebijakan luar negeri. Seluruh fraksi partai, meskipun berbeda ideologi, menentang aneksasi Israel atas Palestina dan mendukung kemerdekaan Palestina. Kedua, dari kerangka diplomasi parlemen, DPR RI aktif dalam urusan luar negeri dengan menggalang dukungan dari parlemen negara lain untuk menolak aneksasi Tepi Barat. Diplomasi ini dilakukan di tingkat multilateral dan

bilateral, sehingga DPR RI berkontribusi dalam menyuarakan penolakan aneksasi, mendukung kebijakan pemerintah, dan memperkuat diplomasi pemerintah (Fadhurrahman, 2022).

Kedua, jurnal yang ditulis oleh M. Jullyo Bagus Firdaus dan Megahnanda Alidyan Kresnawati yang berjudul "Indonesia Parliamentary Diplomacy: The Leadership of House Representatives Republic of Indonesia in ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) 2011-2012" dan diterbitkan pada tahun 2021. Jurnal ini mengadopsi metode penelitian kualitatif dengan kerangka konseptual diplomasi parlemen dan diplomasi total. Dalam penelitian ini, para penulis meneliti peran kepemimpinan DPR RI dalam lembaga parlemen regional AIPA untuk mencapai kepentingan regional dan nasional Indonesia.

Pada bagian pembahasannya, jurnal tersebut menguraikan bahwa DPR RI berperan signifikan dalam mendukung diplomasi internasional yang dilaksanakan oleh pemerintah. Kepemimpinan DPR RI dalam AIPA selama periode 2011-2012 berperan dalam menetapkan tiga prioritas utama AIPA, yaitu:

1. Memajukan inisiatif regional melalui pembentukan komunitas ASEAN.
2. Mempertahankan ketertiban dan stabilitas kawasan sebagai landasan pembangunan berkelanjutan.
3. Mengupayakan visi ASEAN 2015 yang berfokus pada pembentukan Komunitas Masyarakat ASEAN.

Selain itu, kepemimpinan DPR RI dalam AIPA pada periode tersebut juga diarahkan untuk menangani sengketa Laut China Selatan yang sedang memanas. Ketua DPR RI yang juga menjabat sebagai Presiden AIPA pada waktu itu, mempromosikan penyelesaian konflik secara damai melalui negosiasi dan pendekatan damai lainnya dalam kerangka Komunitas Politik-Keamanan ASEAN (APSC). Melalui kepemimpinannya, DPR RI memainkan peran kunci dalam mengarahkan dan memfasilitasi diplomasi parlemen guna mencapai kepentingan regional dan nasional Indonesia serta meningkatkan stabilitas dan kerja sama di kawasan ASEAN (Firdaus & Kresnawati, 2021).

Perbedaan mendasar antara jurnal tersebut dan penelitian ini ialah spesifikasi pembahasan mengenai kepemimpinan DPR RI dalam lembaga parlemene regional dalam hal ini AIPA. Penelitian tersebut tidak secara khusus menentukan satu isu strategis yang dikaitkan dengan peran DPR RI dalam konteks diplomasi parlemen. Sedangkan penulis membahas secara khusus peran DPR RI dalam konteks diplomasi parlemen dalam menangani krisis kemanusiaan di Gaza.

Ketiga, jurnal yang berjudul "DPR RI dan Isu Palestina: Diplomasi Antarparlemen," ditulis oleh Simela Victor Muhamad dan diterbitkan pada tahun 2014, menggunakan metode penelitian kualitatif dan kerangka konseptual diplomasi parlemen sebagai landasan analisis. Dalam pembahasan jurnal ini, peneliti menyoroti upaya DPR RI dalam mengangkat isu Palestina di berbagai forum antarparlemen internasional.

Pertama, DPR RI secara aktif mengangkat isu Palestina dalam forum Inter-Parliamentary Union (IPU). Dalam forum tersebut, delegasi DPR RI mendesak IPU untuk mengeluarkan item darurat dan resolusi-resolusi terkait berbagai isu Palestina, termasuk serangan Israel terhadap Gaza pada tahun 2008. Kedua, dalam forum *Asia Pacific Parliamentary Forum* (APPF), DPR RI bersama dengan anggota APPF lainnya mengecam kebijakan Israel yang bertentangan dengan hukum internasional dan mendorong APPF untuk mengeluarkan resolusi yang mendukung Palestina. Ketiga, DPR RI juga berperan aktif dalam memberikan dukungan kepada Palestina melalui forum *Asian Parliamentary Assembly* (APA) dan *Parliamentary Union of the OIC Member States* (PUIC). Dalam forum-forum tersebut, delegasi DPR RI konsisten menyuarakan isu Palestina di berbagai tingkat pembahasan dan mendorong resolusi untuk menekan tindakan Israel di Palestina (Muhamad, 2014).

Pada bagian akhir jurnal, dijelaskan bahwa isu Palestina merupakan mandat konstitusional yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, yang menempatkan Indonesia untuk aktif mendukung perdamaian dunia serta menghapus segala bentuk penjajahan. DPR RI berupaya melakukan komunikasi dengan parlemen negara-negara lain untuk mendukung perjuangan Palestina. Diplomasi yang dilakukan oleh DPR RI ini bertujuan untuk melengkapi dan mendukung diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia (Muhamad, 2014).

Perbedaan utama antara jurnal tersebut dan fokus skripsi ini adalah bahwa jurnal tersebut tidak membahas landasan atau pijakan DPR RI dalam mendukung Palestina di berbagai forum antarparlemen. Jurnal tersebut hanya menyoroti aktivitas dan kegiatan DPR RI dalam berbagai wadah diplomasi parlemen. Oleh karena itu, skripsi ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menggunakan kerangka konsep diplomasi parlemen dan krisis kemanusiaan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dasar pijakan DPR RI dalam melakukan diplomasi terkait isu Palestina, khususnya dalam menangani krisis kemanusiaan di Gaza.